

Persepsi Masyarakat Mengenai Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024

Agus Sofyan^{1*}, Irfan Afendi², Batin Galang Putera³

^{1,2,3}Administrasi Negara, Institut Pahlawan 12, Jl. Diponegoro No.16, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
agusgober59@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze public perception of the phenomenon of empty boxes in the 2024 Bangka Regency Regional Head Election (Pilkada), which was carried out with only one pair of candidates. The phenomenon of empty boxes is a concern because it reflects the condition of local democracy that lacks competition and causes various perceptions and political attitudes of the community. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with election organizers (KPU and Bawaslu) as well as several voters from four different sub-districts. The results of the study show that public perception is influenced by three main indicators: political attention, political understanding, and political evaluation. The level of political attention tends to decrease in rural areas due to a lack of information and a sense of interest in the electoral process. The public's political understanding of the meaning of empty boxes is still low, especially related to the constitutional rights of voters in facing a single candidate. Political evaluations of the Pilkada system and existing candidates vary, ranging from critical to apathetic. This study recommends the need to improve political literacy, wider and more equitable socialization, and evaluation of candidacy regulations so that local democracy can run more representative and participatory.

Keywords: Public Perception; Empty Boxes; Regional Head Election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bangka tahun 2024, yang dilaksanakan dengan hanya satu pasangan calon. Fenomena kotak kosong menjadi perhatian karena mencerminkan kondisi demokrasi lokal yang minim kompetisi serta menimbulkan beragam persepsi dan sikap politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta beberapa pemilih dari empat kecamatan berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tiga indikator utama: atensi politik, pemahaman politik, dan evaluasi politik. Tingkat atensi politik cenderung menurun di daerah pedesaan akibat minimnya informasi dan rasa ketertarikan terhadap proses pemilu. Pemahaman politik masyarakat terhadap makna kotak kosong masih rendah, terutama terkait hak konstitusional pemilih dalam menghadapi calon tunggal. Evaluasi politik terhadap sistem Pilkada dan calon yang ada beragam, mulai dari sikap kritis hingga apatis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi politik, sosialisasi yang lebih luas dan merata, serta evaluasi terhadap regulasi pencalonan agar demokrasi lokal dapat berjalan lebih representatif dan partisipatif.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; Kotak Kosong; Pemilihan Kepala Daerah

Copyright (c) 2026 Agus Sofyan, Irfan Afendi, Batin Galang Putera

✉Corresponding author: Agus Sofyan

Email Address: agusgober59@yahoo.com (Jl. Diponegoro No.16, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung)

Received 17 July 2026, Accepted 23 July 2026, Published 29 July 2026

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah mereka secara langsung. Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 (pemilukada 2024) di hiasi oleh fenomena yang bisa di bilang fenomenal dalam kontestasi pesta demokrasi Indonesia, yaitu fenomena Kotak kosong yang akan menjadi penantang dalam pemilihan kepala daerah yang khusus hanya

memiliki calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Berbagai narasi dan definisi dikeluarkan dari berbagai pihak yang terlibat mengenai fenomena kotak kosong. Fenomena kotak kosong juga menjadi salah satu isu menarik yang mencuat dalam Pilkada, terutama ketika hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Situasi ini menciptakan dinamika politik yang unik, karena masyarakat dihadapkan pada pilihan antara menyetujui calon tunggal atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan.

Dari perspektif masyarakat, kotak kosong menjadi fenomena yang menarik karena mencerminkan bentuk partisipasi politik yang unik. Studi yang dilakukan oleh Suharyanto (2023) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap kotak kosong dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap calon tunggal, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya, serta adanya anggapan bahwa kotak kosong dapat menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi politik kelompok tertentu. Lebih lanjut, menegaskan bahwa masyarakat di beberapa daerah dengan fenomena kotak kosong menunjukkan sikap skeptis terhadap demokrasi elektoral karena merasa tidak memiliki alternatif pilihan yang kompetitif.

Di Kabupaten Bangka, fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut mengingat dinamika politik lokal yang terus berkembang. Berdasarkan data dari KPU (2024), terdapat kecenderungan bahwa daerah dengan dominasi partai politik tertentu memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghadapi Pilkada dengan calon tunggal. Hal ini diperkuat oleh penelitian Maulana yang menyebutkan bahwa di daerah dengan dominasi partai politik yang kuat, kotak kosong sering kali menjadi pilihan strategis bagi pemilih yang ingin menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap calon yang ada. Sebagian besar masyarakat memahami konsep kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap calon tunggal yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat pendidikan dan akses informasi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap fenomena ini (Maulana, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pandangan, faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, serta implikasinya terhadap proses demokrasi di tingkat lokal baik sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan wacana demokrasi dan menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

METODE

Penelitian deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024, menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif. Dengan dasar penelitian yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam atau indeph interview.

Kajian ini memfokuskan diri pada indikator proses politik yaitu Atensi politik, Pemahaman politik dan Evaluasi politik. Penggalan data dan informasi terkait tiga focus kajian tersebut akan tergambarkan dengan proses wawancara kepada pihak-pihak yang dipandang berkompeten terkait permasalahan tersebut, selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dilapangan, akan diolah dengan tahapan mulai dari Reduksi data (*reduction data*), Penyajian data (*data display*) dan pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN DISKUSI

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti menganalisis setiap indikator berdasarkan perspektif para informan, baik dari kalangan pemilih umum, tokoh masyarakat, maupun penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Pembahasan ini tidak hanya menggambarkan kondisi faktual, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap makna, kecenderungan, dan implikasi sosial-politik yang muncul dari fenomena kotak kosong di tengah masyarakat. Untuk mempermudah analisis, pembahasan ini disusun berdasarkan indikator-indikator persepsi politik sebagai berikut:

Atensi Politik

Atensi politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana masyarakat memperhatikan dan mengikuti perkembangan informasi politik, khususnya dalam bahasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam penelitian ini, atensi politik dimaknai sebagai tingkat perhatian, keterlibatan emosional, dan minat warga Kabupaten Bangka terhadap fenomena kotak kosong yang terjadi dalam Pilkada tahun 2024.

Secara teoritis, atensi politik tidak hanya mencerminkan kesadaran pemilih terhadap agenda politik yang sedang berlangsung, tetapi juga menjadi penentu awal dalam terbentuknya partisipasi dan persepsi politik. Menurut McCombs dan Shaw (1972) dalam teori Agenda-Setting, tingkat perhatian masyarakat terhadap isu politik sangat dipengaruhi oleh seberapa sering dan menonjol isu tersebut disampaikan oleh media. Hal ini sejalan dengan pendapat Zaller (1992) bahwa perhatian dan penerimaan terhadap informasi politik sangat bergantung pada keterpaparan dan kapasitas individu untuk memproses informasi yang tersedia di ruang publik.

Dalam kajian Pilkada Kabupaten Bangka 2024, fenomena calon tunggal disertai keberadaan kotak kosong sebagai pilihan tandingan memunculkan dinamika baru dalam perilaku pemilih. Penelitian ini menemukan bahwa atensi politik masyarakat terhadap Pilkada ini belum merata, bahkan cenderung menurun di sebagian wilayah.

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Bangka Sinarto mengungkap bahwa minimnya kompetisi politik dapat berdampak pada penurunan atensi politik masyarakat. Masyarakat di daerah yang kurang terpapar informasi politik tampak menganggap Pilkada sebagai kegiatan administratif, bukan sebagai proses demokrasi substantif. Sedangkan staf KPU yang bernama Ria Ergathama yang bertanggung jawab dalam bidang sosialisasi menyampaikan pemahaman masyarakat terhadap kotak

kosong masih sangat minim. Banyak yang berpikir kalau hanya ada satu calon, otomatis dia menang. Padahal mereka bisa memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi politik yang signifikan. Menurut Milbrath dan Goel (1977), literasi politik dan perhatian terhadap isu-isu politik sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan sosial politik. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan politik akan kesulitan memahami pilihan-pilihan yang tersedia, termasuk keberadaan kotak kosong sebagai alternatif sah dalam pemilu.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bawaslu terkait dengan atensi politik menggambarkan bahwa kurangnya antusiasme terhadap Pilkada bukan hanya disebabkan oleh apatisme, tetapi juga oleh kebingungan publik terhadap makna dan dampak dari keberadaan kotak kosong. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi yang efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan jika kita melihat dari hasil wawancara dengan masyarakat maka dapat digambarkan bahwa tensi politik erat kaitannya dengan harapan terhadap perubahan sosial dan efektivitas kepemimpinan. Ketika masyarakat merasa kecewa atau tidak percaya bahwa pemilu dapat menghasilkan perubahan nyata, atensi politik pun menurun. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa atensi politik masyarakat Kabupaten Bangka terhadap Pilkada 2024 belum merata. Di wilayah urban atau yang memiliki akses informasi luas, masyarakat lebih memahami konteks politik dan keberadaan kotak kosong. Sementara itu, di daerah pedesaan atau terpencil, rendahnya literasi politik mengakibatkan persepsi yang salah atau bahkan ketidakpedulian terhadap proses demokrasi ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kotak kosong bukan sekadar pilihan administratif, tetapi menjadi cerminan dari kapasitas demokratis masyarakat. Kurangnya atensi politik bisa berimplikasi serius terhadap legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal. Sejalan dengan pandangan Delli Carpini dan Keeter (1996), *political knowledge* dan *attention* merupakan prasyarat penting bagi partisipasi warga negara yang bermakna. Dengan demikian, upaya KPU dan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi harus diperkuat. Perlu pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta media lokal untuk memastikan pesan-pesan demokrasi menjangkau semua kalangan secara inklusif.

Pemahaman Politik

Pemahaman politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas partisipasi dan persepsi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bangka tahun 2024, pemahaman politik masyarakat dapat diartikan sebagai sejauh mana individu mengetahui hak-haknya sebagai pemilih, memahami aturan main pemilu, serta mampu menilai alternatif pilihan yang tersedia—termasuk keberadaan kotak kosong dalam kontestasi calon tunggal.

Menurut Delli Carpini dan Keeter (1996), pemahaman politik (*political knowledge*) mencakup penguasaan informasi faktual mengenai sistem pemerintahan, proses politik, serta isu-isu publik. Semakin tinggi tingkat pemahaman politik seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk terlibat dalam proses politik secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemilu, pemahaman

politik yang baik akan mendorong pemilih untuk tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga memahami konsekuensi dari setiap pilihan politiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, ditemukan bahwa tingkat pemahaman politik masyarakat Kabupaten Bangka terhadap kotak kosong masih sangat beragam. Di wilayah dengan akses informasi dan pendidikan yang lebih baik, pemilih menunjukkan pemahaman yang relatif tinggi mengenai kotak kosong sebagai mekanisme demokratis. Namun, di daerah pedesaan, konsep ini masih sering disalahartikan.

Staf KPU Kabupaten Bangka menyampaikan bahwa banyaknya masyarakat yang masih berpikir bahwa kalau hanya ada satu calon, maka akan otomatis menang. Sedangkan regulasinya menjelaskan bahwa kotak kosong bisa menang jika suaranya lebih banyak. Pernyataan ini menunjukkan adanya gap pengetahuan antara aturan hukum dan persepsi publik. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 54D, pemilih tetap memiliki pilihan ketika hanya ada satu pasangan calon, yaitu dengan memilih kolom kosong jika tidak setuju dengan calon tersebut. Namun, ketidaktahuan masyarakat akan hal ini menunjukkan lemahnya pendidikan politik di tingkat akar rumput.

Sedangkan pernyataan dari beberapa pemilih di beberapa kecamatan juga mengindikasikan pemahaman yang bersifat setengah matang, di mana informasi yang diperoleh tidak diiringi dengan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi dan makna politik di baliknya. Padahal, pemilih yang memahami bahwa kotak kosong bisa menang akan cenderung lebih aktif dan kritis dalam menilai calon yang tersedia.

Dalam pandangan teoritis, pemahaman politik terbentuk dari kombinasi pengalaman, pendidikan, paparan media, dan interaksi sosial (Zaller, 1992). Hal ini juga ditegaskan oleh Lau dan Redlawsk (2006), yang menyatakan bahwa pemilih sering menggunakan heuristik (jalan pintas kognitif) seperti reputasi partai, citra kandidat, atau opini mayoritas untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Namun, ketika informasi dasar seperti keberadaan kotak kosong tidak dipahami, pemilih cenderung bersikap pasif atau bahkan apatis. Pernyataan ini menegaskan adanya krisis kepercayaan terhadap mekanisme pemilu. Ketika pemilih tidak yakin bahwa suaranya memiliki kekuatan untuk memengaruhi hasil, maka pemahaman politik yang dimiliki akan kehilangan dampaknya dalam praktik partisipatif.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman politik masyarakat Kabupaten Bangka terhadap fenomena kotak kosong belum optimal. Banyak pemilih yang belum memahami bahwa kotak kosong adalah bentuk sah dari pilihan politik, dan bahwa jika kotak kosong menang, maka pemilihan harus diulang dengan calon baru. Kekurangan pemahaman ini menjadi hambatan serius bagi terciptanya demokrasi yang partisipatif dan representatif.

Upaya pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sudah berjalan, namun belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berkelanjutan—misalnya melalui kemitraan dengan sekolah, pesantren, tokoh adat, serta penggunaan media lokal dan sosial yang relevan dengan masyarakat setempat.

Evaluasi Politik

Evaluasi politik adalah proses di mana individu atau kelompok menilai aspek-aspek politik berdasarkan informasi, pengalaman, dan preferensi mereka. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bangka 2024, evaluasi politik masyarakat mencerminkan bagaimana mereka menilai kualitas calon tunggal, efektivitas sistem politik lokal, serta makna dan dampak dari memilih kotak kosong.

Menurut Lau dan Redlawsk (2006), evaluasi politik tidak selalu bersifat rasional sepenuhnya, melainkan dipengaruhi oleh *heuristik* seperti persepsi publik, emosi, dan narasi yang berkembang. Evaluasi ini sangat penting dalam konteks pemilu karena menjadi dasar bagi pemilih dalam mengambil Keputusan baik untuk mendukung calon tunggal, memilih kotak kosong, atau bahkan memilih untuk tidak menggunakan hak suara sama sekali. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa masyarakat Kabupaten Bangka memiliki penilaian yang beragam terhadap fenomena calon tunggal dan keberadaan kotak kosong. Sebagian besar pemilih di wilayah yang lebih terpapar informasi menganggap kotak kosong sebagai instrumen demokratis untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap dominasi politik.

Berdasarkan wawancara dengan pemilih di ketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih belum sepenuhnya baik. Bahkan salah satu pemilih dari kecamatan Sungailiat memiliki pemahaman bahwa pemilihan dengan satu calon tunggal merupakan penggiringan dalam Pemilihan. Pernyataan ini mencerminkan evaluasi yang kritis terhadap sistem politik lokal, terutama dalam hal pencalonan yang tidak kompetitif. Pilihan terhadap kotak kosong dipahami bukan sebagai bentuk golput, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi elite politik atau oligarki lokal.

Sebaliknya, di beberapa wilayah lain, terutama pedesaan, evaluasi politik cenderung pasif. Beberapa warga menilai bahwa Pilkada 2024 tidak lebih dari formalitas politik karena hasilnya dianggap sudah dapat dipastikan. Pernyataan ini memperlihatkan rendahnya kepercayaan terhadap sistem pemilu sebagai ruang kontestasi yang adil, sehingga evaluasi politik menjadi tumpul dan bersifat pasrah. Hal ini sejalan dengan temuan Zaller (1992) yang menyebutkan bahwa persepsi dan evaluasi publik terhadap isu politik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan seberapa besar kepercayaan mereka terhadap institusi demokrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa evaluasi politik masyarakat tidak lepas dari interaksi antara kesadaran politik, pengalaman, dan kualitas institusi pemilu. Di satu sisi, terdapat kelompok yang menjadikan kotak kosong sebagai alat evaluasi terhadap calon dan sistem politik; di sisi lain, terdapat kelompok yang justru mengalami demoralisasi politik, merasa prosesnya tidak membawa dampak nyata.

Evaluasi politik yang rendah dapat berdampak serius pada legitimasi hasil pemilihan dan kualitas kepemimpinan yang terbentuk. Sebagaimana dinyatakan oleh Diamond dan Morlino (2005), demokrasi yang berkualitas ditentukan oleh partisipasi aktif dan penilaian kritis warga terhadap proses dan hasil politik. Jika masyarakat berhenti mengevaluasi secara aktif, maka demokrasi akan kehilangan kontrol publik terhadap kekuasaan.

Dengan demikian, fenomena kotak kosong harus dipahami bukan hanya sebagai prosedur alternatif dalam Pilkada dengan calon tunggal, tetapi juga sebagai refleksi dari penilaian politik

masyarakat terhadap sistem dan aktor-aktor politik lokal. Upaya penyelenggara pemilu untuk membangun ruang evaluasi yang sehat, melalui dialog publik, transparansi informasi, dan penguatan pendidikan politik, menjadi sangat penting untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap persepsi masyarakat Kabupaten Bangka mengenai fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa persepsi tersebut dibentuk oleh tiga indikator utama, yaitu atensi politik, pemahaman politik, dan evaluasi politik. Ketiga indikator ini saling berhubungan dan menjadi faktor penentu dalam pembentukan sikap masyarakat terhadap keberadaan calon tunggal dan kotak kosong sebagai alternatif pilihan politik.

Pertama, dari sisi atensi politik, penelitian menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap Pilkada 2024 cenderung menurun, terutama setelah diketahui bahwa hanya terdapat satu pasangan calon. Di wilayah urban seperti Sungailiat, atensi relatif lebih tinggi karena akses informasi yang lebih baik. Namun, di wilayah pedesaan dan terpencil, atensi politik masyarakat rendah karena minimnya informasi dan kurangnya minat terhadap proses politik yang dianggap sudah pasti.

Kedua, pada indikator pemahaman politik, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa kotak kosong merupakan opsi sah dalam pemilu. Banyak warga mengira calon tunggal akan otomatis menang, dan tidak mengetahui bahwa suara untuk kotak kosong dapat menggugurkan kemenangan tersebut jika memperoleh suara terbanyak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi politik yang serius di kalangan masyarakat pemilih.

Ketiga, dari aspek evaluasi politik, terlihat bahwa masyarakat yang kritis cenderung menjadikan kotak kosong sebagai simbol protes terhadap dominasi politik atau oligarki lokal. Namun, sebagian besar pemilih lainnya cenderung bersikap apatis atau menyerah pada sistem yang mereka anggap tidak memberikan ruang kompetisi yang sehat. Akibatnya, terjadi erosi kepercayaan terhadap proses pemilu dan sistem politik secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Persepsi Masyarakat terhadap fenomena kotak kosong dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu Atensi Politik masyarakat Kabupaten Bangka terhadap Pilkada 2024 cenderung menurun, khususnya setelah diketahui bahwa hanya terdapat satu pasangan calon. Di wilayah yang memiliki akses informasi dan infrastruktur komunikasi yang baik, perhatian masyarakat terhadap Pilkada masih cukup tinggi. Namun, di wilayah pedesaan dan pinggiran, masyarakat menunjukkan sikap apatis dan kurang antusias karena merasa tidak memiliki pilihan yang berarti. Kemudian pemahaman politik masyarakat terhadap keberadaan kotak kosong masih rendah. Sebagian besar pemilih belum memahami bahwa kotak kosong adalah pilihan sah dan dapat memenangkan pemilu jika memperoleh suara terbanyak. Kesalahan persepsi ini disebabkan oleh

rendahnya literasi politik, keterbatasan sosialisasi, dan kurangnya penyebaran informasi yang efektif oleh penyelenggara pemilu.

Sedangkan Evaluasi Politik terhadap calon tunggal dan sistem pemilu menunjukkan beragam respon. Sebagian pemilih memandang kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap dominasi elite politik, namun banyak pula yang menganggapnya sebagai formalitas belaka. Evaluasi yang bersifat pasif dan skeptis ini berdampak pada rendahnya legitimasi politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bangka mencerminkan tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan kompetitif. Kurangnya pemahaman, rendahnya kepercayaan, dan ketimpangan akses informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses politik yang berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hikmat, dan penyertaan-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada para responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian, para dosen, pembimbing, serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bantuan, perhatian, dan kerja sama yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

REFERENSI

- Ahmad Yantomi. (2022). Kajian yuridis kemenangan kotak kosong pada pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Anna Triningsih, Subiyanto, A. E., & Nurhayani. (2022). Kesadaran berkonstitusi bagi penegak hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga kewibawaan peradilan. *Jurnal Konstitusi*.
- Ardi, T. (2008). *Psikiatri Islam*. UIN-Malang Press.
- Asita Widayarsi, Dewi, R. A., & Rengganis, V. M. S. (2019). Gerakan politik pendukung kotak kosong: Keterlibatan civil society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*.
- Barlian, E. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Sukabina Press.
- Chakim, M. L. (2014). Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dalam dinamika pelaksanaan demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Collins English Dictionary. (2012). *Complete & unabridged* (10th ed.). HarperCollins Publishers. <http://www.dictionary.com/browse/smartphone>
- Darminto, D. P., & Julianty, R. (2002). *Metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. BPFE.

- Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1996). *What Americans know about politics and why it matters*. Yale University Press.
- Douglas, M. M., Kosicki, G. M., & McLeod, J. M. (2002). Media effects: Advances in theory and research. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), *Media effects: Advances in theory and research*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Firdayanti B. Hakima, Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, & Ramly, A. T. (n.d.). Persepsi, pengambilan keputusan, konsep diri dan values. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3, 160–170.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Haryanto, T. (2022). *Oligarki politik dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Irwanto. (2002). *Psikologi umum*. PT Prenhallindo.
- James, W. (1890). *The principles of psychology*. Henry Holt and Company.
- Komaruddin. (2001a). *Ensiklopedia manajemen*. Bumi Aksara.
- Komaruddin. (2001b). *Metode penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Bumi Aksara.
- Krech, D., & Crutchfield, R. S. (1974). *Persepsi: Teori dan aplikasinya*. UI Press.
- Krisnawati. (2021). *Metodologi penelitian*. Refika Aditama.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen pemasaran* (13th ed.). Erlangga.
- Lau, R. R., & Redlawsk, D. P. (2006). *How voters decide: Information processing during election campaigns*. Cambridge University Press.
- Lodge, M., & Taber, C. (2013). *The rationalizing voter*. Cambridge University Press.
- Luthans, F. (2011). *Perilaku organisasi* (12th ed.). Andi.
- Maulana, R. (2018). Analisis persepsi masyarakat terhadap fenomena kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 45–60.
- McCombs, M., & Shaw, D. L. (1993). The evolution of agenda-setting theory: 25 years in the marketplace of ideas. *Journal of Communication*, 43(2), 58–67.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). UI Press. (Original work published 1984)
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* Rand McNally College Publishing.
- Moertopo, A. (1982). *Strategi pembangunan nasional*. CSIS.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2005). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (2011). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

- Panjaitan, M., Rajagukguk, J., & Hulu, S. B. F. (2024). Analisis proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada Pilkada serentak tahun 2020. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Prasetyo, A., & Wijaya, B. (2023). *Dinamika demokrasi dalam pemilihan kepala daerah: Fenomena kotak kosong di Indonesia*. Pustaka Demokrasi.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Sari, D. M. (2022). *Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Tahun 2020 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)* (Tesis, Universitas Lampung).
- Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon tunggal Pilkada: Krisis kepemimpinan dan ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 45–70.
- Sayyidatul Insiyah, Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah komparasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryo. (2004). *Psikologi untuk keperawatan*. EGC.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi Offset.
- Widyasari, A., Dewi, R. A., & Rengganis, V. M. S. (2019). Gerakan politik pendukung kotak kosong: Keterlibatan civil society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*, 1(2), 123–145.
- Wiradi, G. (2006). *Analisis sosial*. Yayasan AKATIGA.
- Zaller, J. (1992). *The nature and origins of mass opinion*. Cambridge University Press.